

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengambil beberapa tinjauan dari penelitian terdahulu sebagai referensi. Dengan tujuan untuk mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta perbandingan yang memadai sehingga penulis lebih memadai.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Eko Permana Septian (2018)	Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan normative dan empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data yang tersaji dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat miskin di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai representasi asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial RI) kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan bantuan sosial di kabupaten serdang bedagai dengan pendekatan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Safaruddin , Fatmawati , Burhanuddin, Hafiz Elfiansya (2019)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tamalate Kota Makasar	Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pada aspek hubungan organisasi dan antar organisasi terdapat komitmen dari organisasi lintas sector dalam pelaksanaan PKH, dimana Dinas Sosial dan Dnas Pendidikan berkomitmen menyukseskan program pemerintah di Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan sebagai perpanjangan tangan dari kementerian masing-masing. Pada aspek perilaku implementor menunjukkan adanya upaya dan langka-langka yang dilakukan oleh implementor level bawah, yakni pendamping agar program PKH dapat berjalan dengan efektif dan efisien, meskipun di beberapa aspek lainnya, pendamping masih belum mampu mengambil suatu tindakan dalam mengatasi suatu masalah yang ada dilingkup KMP. Pada aspek perilaku kelompok sasaran menunjukkan respon positif KPM dengan meningkatnya angka partisipasi blajar siswa dengan adanya bantuan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				PKH pada bidang Pendidikan.
3.	Viki Setiawan Rambe (2019)	Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Bimbingan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengetasan kemiskinan di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Sedang	<p>Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)</li> <li>2) Pendapatan masyarakat terhadap program keluarga harapan (PKH)</li> <li>3) Dampak program keluarga harapan (PKH) terhadap masyarakat kurang mampu dikelurahan saentis Kabupaten Deli serdang.</li> </ol> <p>Jenis penelitian ii merupakan penelitian deskriptif kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gambaran umum Hasil penelitian menunjukkan, prses pelaksanaan keluarga harapan dalam upaya pengetasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yakni sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Target penetapan sasaran calon penerima PKH</li> <li>2) Penetapan lokasi penerimaan program keluarga Harapan</li> <li>3) Proses persiapan pertemuan awal dan validasi</li> <li>4) Penyaluran bantuan</li> <li>5) Pembentukan kelompok peserta program keluarga harapan</li> <li>6) Verifikasi Komitmen</li> <li>7) Penangguhan dan pembatalan</li> <li>8) Pemutakhiran data</li> <li>9) Pengaduan</li> </ol> </li> </ol>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				peserta PKH Kemudian, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode individual dan kelompok, terbukti program keluarga harapan di kelurahan saentis Kabupaten deli serdang, dilihat dari tujuan dan fungsi Bimbingan Penyuluhan islam telah tercapai.

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan sumber bacaan dan penelitian sebelumnya yang dapat menjadikan bahan rujukan atau perbandingan dengan judul skripsi yang dikaji oleh peneliti. Sumber bacaan yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya sehingga dapat memberikan gambaran tentang sasaran penelitian yang akan dipaparkan dalam penelitian ini.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Peran

Menurut Abu Ahmadi ( 1982 ) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya.

Teori peran seperti yang dinyatakan dalam Lubis (2011:50) berkaitan dengan peranan sosial. Susunan atau tanggapan perilaku yang kita harapkan dan kehendaki disebut sebagai peranan sosial. Peran dapat di gambarkan secara sederhana sebagai bagian dari orang-orang yang saling berinteraksi. Peranan sosial menggambarkan hak, tugas, kewajiban, dan perilaku yang sesuai dengan orang yang memegang posisi

tertentu dalam konteks sosial tertentu. Peran membedakan perilaku dari orang yang menduduki posisi organisasi tertentu dan berfungsi mempersatukan pembagian kerja. Peran merupakan komponen perilaku nyata yang disebut norma. Norma-norma adalah harapan dan kebutuhan perilaku yang sesuai untuk suatu peranan tertentu. Tiap peran berhubungan dengan suatu identitas yang menggambarkan individu dalam hal bagaimana mereka perlu bertindak dalam situasi khusus. Suatu aspek penting dari teori peran adalah identitas yang menduduki jabatan tertentu dalam suatu organisasi formal atau suatu kelompok informal membawa pola perilaku bersama yang diharapkan.

Teori peran juga mengemukakan bahwa konflik dan ketegangan sering terjadi ketika sulit bagi individu untuk berhasil menjalankan berbagai peran mereka karena sumber daya yang dibatasi misalnya oleh waktu atau energi (Lawrence dan Kecmar, 2012). Seseorang memiliki peran, baik di dalam maupun di luar pekerjaannya. Masing-masing peran menghendaki perilaku yang berbeda-beda. Seorang karyawan dalam lingkungan pekerjaan mungkin memiliki lebih dari satu peran, seorang karyawan dapat berperan sebagai bawahan, penyelia, anggota serikat pekerja, dan wakil dalam panitia keselamatan kerja (Agustina, 2009). Teori peran mengemukakan bahwa karyawan akan semakin tidak dapat menangani setiap peran dengan sukses jika mereka mengambil banyak peran berturut-turut, yang pada akhirnya akan menyebabkan konflik (Bakar dan Salleh, 2015).

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

1. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

### **2.2.2 Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. (PKH, 2008 : 1) Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrument yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat.

Pada tahun 2007 dilakukan uji coba di 7 provinsi dengan jumlah sasaran program sebanyak 500.000 RTSM. Ketujuh provinsi tersebut adalah : Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.

### **2.2.3 Pengertian PKH**

Menurut peraturan Menteri Sosial Nomor 2018 tentang PKH menyebutkan bahwa PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat untuk keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Adapun tujuan PKH adalah :

#### 1. Tujuan Umum PKH

Tujuan umum PKH adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

#### 2. Tujuan Khusus PKH

Adapun tujuan khusus PKH antara lain:

- a. Meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan peserta PKH
- c. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH
- d. Mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial.
- e. Memastikan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial

#### 3. Lembaga Pendukung PKH

Dalam pelaksanaan PKH terdapat tim koordinasi yang membantu kelancaran program tingkat provinsi, dan PT.Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan menyampaikan bantuan ketangan penerima manfaat langsung.

Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan.

#### 4. Sumber Dana PKH

Sumber dana yang didapatkan dari Program Keluarga Harapan ini bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

APBN adalah suatu daftar secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan Negara dan alokasi pengeluaran Negara dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. APBN bertujuan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan Negara agar terjadi keseimbangan dinamsi, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada akhirnya semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### 5. Sasaran PKH

Sasaran PKH ialah keluarga miskin/tidak mampu dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi, Kementerian Sosial RI. Keluarga tersebut harus memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH.

#### 2.2.4 Komponen penerima PKH

Menurut Aminuddin komponen adalah keseluruhan makna dari suatu kata, terdiri atas sejumlah elemen yang mana antara elemen memiliki ciri yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Palmer component is a total meaning of a word being seen in terms of a number of distinct element or components of meaning. Jadi komponen merupakan bagian atau suatu unsur yang dimiliki dalam suatu system tertentu.

Penerima PKH memiliki tiga komponen antara lain:

1. Komponen Kesehatan memiliki kriteria:
  - a. Ibu hamil/menyusui
  - b. Anak usia 0 (nol) sampai dengan usia 6 (enam) tahun
2. Komponen pendidikan memiliki kriteria:
  - a. Anak SD/MI atau sederajat

- b. Anak SMP/MTs atau sederajat
  - c. Anak SMA /MA atau sederajat
  - d. Anak usia 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
3. Komponen kesejahteraan sosial memiliki kriteria :
- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
  - b. Penyandang disabilitas berat

Keluarga penerima manfaat PKH berhak mndaatkan:

1. Bantuan Sosial PKH
2. Pendamping PKH
3. Pelayanan difasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
4. Program bantuan komplementer di bidang pendidikan, kesehatan, subsidi energi, ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga penerima PKH selain mempunyai hak akan tetapi juga memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatansesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil atau menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun

Semua anggota keluarga penerima PKH harus memenuhi kewajiban kepesertaan PKH, pemenuhan kewajiban dan keluarga penerima bantuan PKH akan menjadi dasar untuk penyaluran bantuan sosial serta hak kepesertaan lainnya yakni bantuan sosial, pendamping sosial, pelayanan difasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dan bantuan komplementer yang memenuhi kewajiban akan mendapat hak sesuai

ketentuan program sedangkan keluarga penerima bantuan PKH yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan bantuan sosial PKH ataupun pemberhentian kepesertaan PKH.

### **2.2.5 Pemanfaatan Bantuan Sosial PKH**

Berdasarkan dari ketiga komponen penerima manfaat dan kewajibannya maka penerima manfaat juga harus menggunakan danayang diterima misalnya:

- a. Komponen kesehatan ada ibu hamil/menyusui dan anak belita uang tersebut digunakan untuk membeli makanan bergizi bagi ibu hamil, membeli obat memeriksa kandungan serta rutin dan membeli kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan baik untuk balita maupun ibu hamilnya sendiri.
- b. Komponen pendidikan yaitu mulai dari SD, SMP, dan SMA dana tersebut digunakan untuk biaya pendidikan misalnya membeli buku, seragam sekolah, membeli tas, membeli sepatu serta alat-alatyang berkaitan dengan pendidikan.

Terdapat beberapa tujuan penggunaan bantuan sosial:

- a. Perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan menangani resiko dan guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal
- b. Rehabilitas sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar
- c. Jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- d. Perbedaan sosial, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
- e. Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi manusia
- f. Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitas.

### **2.2.6 Konsep Pendampingan PKH**

Pendampingan menurut Direktorat bantuan sosial merupakan suatu proses memberikan kemudahan kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan ataupun dalam memecahkan suatu permasalahan dan mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian dapat diwujudkan.

Pendampingan dalam PKH diperlukan untuk mempercepat proses pencapaian salah satu tujuan PKH yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian dalam mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan kesejahteraan sosial. Pendampingan PKH bertujuan memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.

Adapun tugas dari pendamping PKH adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran

2. Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap sebulan.
3. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi ekonomi, energy, prusahaan dan pemenuhankebutuhan dasar lain.

### **2.2.7 Kemiskinan**

#### **1. Pengertian Kemiskinan**

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi: suatu pengantar , Rajawali Press (Soekanto, 1982: 10) kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan panganehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal.

## 2. Tinjauan Tentang Kemiskinan

Menurut (Suryawati, 2004) berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan, kemiskinan menurut jenisnya kemiskinan dibedakan dua kategori. Pertama, kemiskinan relative yaitu kemiskinan yang dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibanding dengan poporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya. Kedua, kemiskinan absolut yaitu suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang

tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, papan, pangan dan pendidikan.

Sedangkan menurut akar penyebab yang melatarbelakangi kemiskinan juga bisa dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Kedua, kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat dimana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama dari segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya raya itu masih menguasai berbagai kehidupan masyarakat. Selama itu pula dipekirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut kemiskinan struktural.

### 3. Masalah kemiskinan

Menurut Parsudi Suparlan akar dari timbulnya masalah kemiskinan di Kecamatan Sukolilo adalah karena kedudukan masyarakat negara tersusun dalam jaringan yang bertingkat-tingkat dan merupakan pusat-pusat penguasaan bagi pengaturan kesejahteraan, kehidupan warga masyarakat negara. Sedangkan bagian terbawah dalam sistem penguasaan adalah pedesaan. Karena itulah manusia cenderung berorientasi ke kota atau dengan kata lain, orang desalah yang berorientasi ke kota dan

bukan orang kaya yang berorientasi ke desa. Karena adanya kecendrungan orientasi pada kota, kota akan cenderung tumbuh terus menerus dan menjadi semakin kompleks karena kota mempunyai potensi atau kemampuan untuk menampung pendatang-pendatang baru dari pedesaan dan kota-kota lainnya atau tempat-tempat lainnya. Kemampuan atau potensi kota adalah karena corak sistem ekonomi lebih menekankan pada pekerjaan-pekerjaan dalam bidang industri dan produksi barang jadi atau setengah jadi. Pekerjaan dalam bidang-bidang tersebut dapat menampung pekerjaan kemanapun keahlian dalam teknologi tinggi, maupun pekerjaan yang hanya mengandalkan pada keterampilan dan kekuatan tenaga kasar.

Perbandingan perkotaan dengan pedesaan lebih banyak terdapat alternatif alternatif untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari yang paling halus sampai dengan yang paling kasar, dari yang paling bersih sampai dengan yang paling kotor dan dari yang bermolar sampai dengan yang tidak bermolar. Sedangkan di daerah pedesaan, sistem ekonominya lebih menekankan pada penghasilan bahan-bahan mentah dan bahan makanan. Maka alternatif-alternatif yang tersedia atau yang ada dalam sistem ekonomi tersebut lebih terbatas dari pada yang terdapat di perkotaan.

#### 4. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai

masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka itu sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu, baru terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih besar.

Adapun tujuan dari penanggulangan kemiskinan, yaitu :

- a. Membantu keluarga miskin memperoleh kebutuhan pokok dengan cara yang terjangkau.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga sasaran, khususnya dalam bidang ekonomi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan secara mandiri.
- c. Mengembangkan kemampuan keluarga sasaran agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki
- d. Meningkatkan akses keluarga miskin untuk mendapatkan modal, teknologi, dan memiliki usaha yang tetap, serta akses

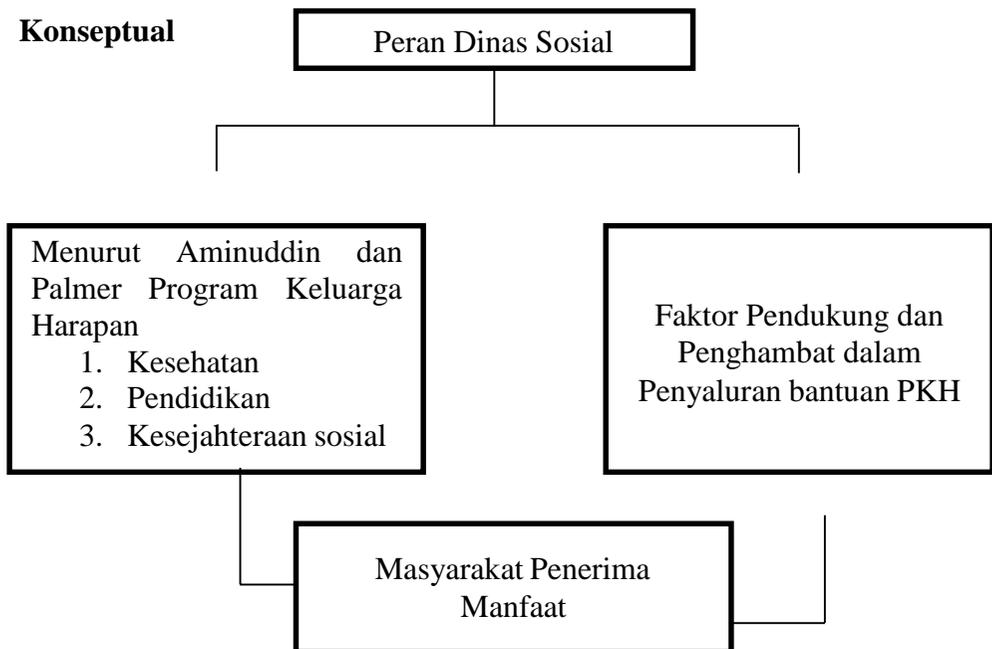
untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki.

- e. Menumbuhkan dinamika sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan secara gotong-royong oleh masyarakat
- f. Memperkuat kondisi dan keterpaduan di antara unsur-unsur yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

### 2.3 Kerangka Dasar Pemikiran

**Gambar 2. 1 Kerangka Dasar**

**Konseptual**



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Ada dua faktor yang penting dalam peran Dinas Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan dan faktor pendukung penghambat dalam

penyaluran bantuan PKH. Untuk meningkatkan peran Dinas Sosial perlu adanya sistem yang tertata dengan baik serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat.